BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan penggeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.104.113.319.000,00 bertambah sejumlah Rp84.848.191.000,00 sehingga menjadi Rp2.019.265.128.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp	2.042.708.319.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(153.436.952.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.889.271.367.000,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp	2.095.813.319.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(84.848.191.000,00)
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	2.010.965.128.000,00
	Defisit setelah perubahan	Rp	(121.693.761.000,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp	61.405.000.000,00
	2) Bertambah (berkurang)	Rp	68.588.761.000,00
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	129.993.761.000,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp	8.300.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	8.300.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	121.693.761.000,00
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	284.009.239.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(27.542.924.000,00)
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	256.466.315.000,00
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp	1.274.999.202.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(127.937.792.000,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	1.147.061.410.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	483.699.878.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.043.764.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	485.743.642.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	55.995.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.250.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	49.745.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	13.381.574.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.339.804.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	10.041.770.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	22.279.897.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(598.454.000,00)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	21.681.443.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	192.352.768.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp	(17.354.666.000,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	174.998.102.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	25.572.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.442.566.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	27.015.516.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	934.782.107.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(86.829.889.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	847.952.218.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	314.644.145.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(42.550.469.000,00)
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	272.093.676.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	88.830.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.363.900.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	100.194.300.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp	112.992.776.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.250.000.000,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp	91.742.776.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp	33.780.730.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp	(3.102.136.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	30.678.594.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15.032.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	15.032.000.000,00

e. Pendapatan lainnya

1) Semula	Rp	248.095.972.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp	248.095.972.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.281.187.859.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.309.986.000,00)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	1.271.877.873.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	814.625.460.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	75.538.205.000,00)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	739.087.255.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	794.513.894.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(23.238.608.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	771.275.286.000,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.883.815.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	2.383.815.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	77.568.353.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.739.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	79.307.353.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	20.759.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.982.500.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	8.776.500.000,00

e. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	6.937.738.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	6.937.738.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	379.908.874.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.636.949.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	390.545.823.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.651.358.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	12.651.358.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	57.335.521.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.774.724.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	49.560.797.000,00
b. Belanja Barang/Jasa		
1) Semula	Rp	515.949.380.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15.603.341.000,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	531.552.721.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	241.340.559.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(83.366.822.000,00)
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	157.973.737.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	61.405.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	68.588.761.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	129.993.761.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	8.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	8.300.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis penerimaan pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

a. Semula	Rp	61.405.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	68.588.761.000,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	129.993.761.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

a.	Semula	Rp	8.300.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	8.300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-208/2020)

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-208/2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	2.042.708.319.000,00	1.889.271.367.000,00	(153.436.952.000,00)	(7,51)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	284.009.239.000,00	256.466.315.000,00	(27.542.924.000,00)	(9,70)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	55.995.000.000,00	49.745.000.000,00	(6.250.000.000,00)	(11,16)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.381.574.000,00	10.041.770.000,00	(3.339.804.000,00)	(24,96)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.279.897.000,00	21.681.443.000,00	(598.454.000,00)	(2,69)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.352.768.000,00	174.998.102.000,00	(17.354.666.000,00)	(9,02)
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	1.274.999.202.000,00	1.147.061.410.000,00	(127.937.792.000,00)	(10,03)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.572.950.000,00	27.015.516.000,00	1.442.566.000,00	5,64
1.2.2	Dana Alokasi Umum	934.782.107.000,00	847.952.218.000,00	(86.829.889.000,00)	(9,29)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	314.644.145.000,00	272.093.676.000,00	(42.550.469.000,00)	(13,52)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	483.699.878.000,00	485.743.642.000,00	2.043.764.000,00	0,42
1.3.1	Pendapatan Hibah	88.830.400.000,00	100.194.300.000,00	11.363.900.000,00	12,79
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.992.776.000,00	91.742.776.000,00	(21.250.000.000,00)	(18,81)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.780.730.000,00	30.678.594.000,00	(3.102.136.000,00)	(9,18)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	15.032.000.000,00	15.032.000.000,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	248.095.972.000,00	248.095.972.000,00	0,00	0,00
2	**BELANJA**	2.095.813.319.000,00	2.010.965.128.000,00	(84.848.191.000,00)	(4,05)
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.281.187.859.000,00	1.271.877.873.000,00	(9.309.986.000,00)	(0,73)
2.1.1	Belanja Pegawai	794.513.894.000,00	771.275.286.000,00	(23.238.608.000,00)	(2,92)
2.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	2.383.815.000,00	1.883.815.000,00	376,76
2.1.4	Belanja Hibah	77.568.353.000,00	79.307.353.000,00	1.739.000.000,00	2,24
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.759.000.000,00	8.776.500.000,00	(11.982.500.000,00)	(57,72)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.937.738.000,00	6.937.738.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	379.908.874.000,00	390.545.823.000,00	10.636.949.000,00	2,80
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	12.651.358.000,00	11.651.358.000,00	1.165,14

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	814.625.460.000,00	739.087.255.000,00	(75.538.205.000,00)	(9,27)
2.2.1	Belanja Pegawai	57.335.521.000,00	49.560.797.000,00	(7.774.724.000,00)	(13,56)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	515.949.380.000,00	531.552.721.000,00	15.603.341.000,00	3,02
2.2.3	Belanja Modal	241.340.559.000,00	157.973.737.000,00	(83.366.822.000,00)	(34,54)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.105.000.000,00)	(121.693.761.000,00)	(68.588.761.000,00)	129,16
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	61.405.000.000,00	129.993.761.000,00	68.588.761.000,00	111,70
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.405.000.000,00	129.993.761.000,00	68.588.761.000,00	111,70
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.105.000.000,00	121.693.761.000,00	68.588.761.000,00	129,16
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)

KODE	URUSAN	PENDAPATAN				BELANJA							
						SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERLEBIH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**181.414.062**	**166.862.152**	**(14.551.910)**	**(8,02)**	**681.997.993**	**588.032.894**	**1.270.030.887**	**668.675.157**	**531.698.099**	**1.200.373.256**	**(69.657.631)**	**(5,48)**
1.01	Pendidikan	0	0	-	-	551.573.102	159.781.749	711.354.851	534.783.775	171.513.070	706.296.845	(5.058.006)	(0,71)
1.02	Kesehatan	178.534.768	165.180.102	(13.354.666)	(7,48)	82.190.951	268.830.500	351.021.451	84.611.201	265.390.782	350.001.983	(1.019.468)	(0,29)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.154.294	982.050	(1.172.244)	(54,41)	7.901.100	123.318.125	131.219.225	7.556.799	64.740.785	72.297.584	(58.921.641)	(44,90)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	725.000	700.000	(25.000)	(3,45)	16.832.576	20.282.157	37.114.733	4.769.024	17.624.688	22.393.712	(14.721.021)	(39,66)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0	0	-	-	6.144.893	10.276.763	16.421.656	6.034.306	8.181.505	14.215.811	(2.205.845)	(13,43)
1.06	Sosial	0	0	-	-	17.355.371	5.543.600	22.898.971	30.920.052	4.247.269	35.167.321	12.268.350	53,58
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**4.504.630**	**3.831.230**	**(673.400)**	**(14,95)**	**427.658.789**	**84.117.535**	**511.776.324**	**437.855.691**	**65.101.307**	**502.956.998**	**(8.819.326)**	**(1,72)**
2.01	Tenaga Kerja	100.000	100.000	-	-	3.146.068	2.190.818	5.336.886	3.122.610	2.450.851	5.573.461	236.575	4,43
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	-	-	100.000	514.719	614.719	100.000	321.417	421.417	(193.302)	(31,45)
2.03	Pangan	175.000	175.000	-	-	4.130.422	8.165.862	12.296.284	3.813.056	8.965.965	12.779.021	482.737	3,93
2.04	Pertanahan	0	0	-	-	0	1.280.500	1.280.500	0	2.424.648	2.424.648	1.144.148	89,35
2.05	Lingkungan Hidup	250.200	250.200	-	-	8.439.380	12.162.750	20.602.130	8.359.974	11.498.224	19.858.198	(743.932)	(3,61)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0	0	-	-	2.535.303	5.418.016	7.953.319	2.433.654	4.957.158	7.390.812	(562.507)	(7,07)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	-	-	389.756.838	3.404.082	393.160.920	400.512.979	2.989.054	403.502.033	10.341.113	2,63
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	-	-	0	7.440.283	7.440.283	0	6.955.457	6.955.457	(484.826)	(6,52)
2.09	Perhubungan	2.950.000	2.434.000	(516.000)	(17,49)	3.854.718	12.468.192	16.322.910	3.686.564	11.471.008	15.157.572	(1.165.338)	(7,14)
2.10	Komunikasi dan Informatika	714.630	714.630	-	-	2.672.532	3.475.940	6.148.472	2.899.462	3.257.909	6.157.371	8.899	0,14
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	-	-	2.693.807	3.388.085	6.081.892	3.046.738	2.005.564	5.052.302	(1.029.590)	(16,93)
2.12	Penanaman Modal	0	0	-	-	2.312.681	1.635.172	3.947.853	2.173.800	1.102.551	3.276.351	(671.502)	(17,01)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	314.800	157.400	(157.400)	(50,00)	5.592.388	14.495.557	20.087.945	5.189.902	2.261.527	7.451.429	(12.636.516)	(62,91)
2.14	Statistik	0	0	-	-	0	217.460	217.460	0	141.877	141.877	(75.583)	(34,76)
2.15	Persandian	0	0	-	-	0	233.000	233.000	0	147.712	147.712	(85.288)	(36,60)
2.16	Kebudayaan	0	0	-	-	124.500	5.371.119	5.495.619	144.500	3.070.271	3.214.771	(2.280.848)	(41,50)

KODE	URUSAN	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERLEBIH / (BERKURANG)	
						BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH		
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
2.17	Perpustakaan	0	0	-	-	0	1.256.510	1.256.510	0	478.924	478.924	(777.586)	(61,88)
2.18	Kearsipan	0	0	-	-	2.300.152	999.470	3.299.622	2.372.452	601.190	2.973.642	(325.980)	(9,88)
3	**URUSAN PILIHAN**	**5.797.650**	**4.178.490**	**(1.619.160)**	**(27,93)**	**26.898.560**	**35.590.253**	**62.488.813**	**20.397.939**	**50.626.531**	**71.024.470**	**8.535.657**	**13,66**
3.01	Kelautan dan Perikanan	0	0	-	-	0	1.898.444	1.898.444	0	1.525.939	1.525.939	(372.505)	(19,62)
3.02	Pariwisata	0	0	-	-	0	4.921.057	4.921.057	0	1.968.977	1.968.977	(2.952.080)	(59,99)
3.03	Pertanian	607.650	576.990	(30.660)	(5,05)	20.527.782	10.575.402	31.103.184	14.034.301	8.178.955	22.213.256	(8.889.928)	(28,58)
3.06	Perdagangan	5.190.000	3.601.500	(1.588.500)	(30,61)	6.270.778	13.610.414	19.881.192	6.363.638	35.292.154	41.655.792	21.774.600	109,52
3.07	Perindustrian	0	0	-	-	0	4.484.936	4.484.936	0	3.654.629	3.654.629	(830.307)	(18,51)
3.08	Transmigrasi	0	0	-	-	100.000	100.000	200.000	0	5.877	5.877	(194.123)	(97,06)
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**1.850.991.977**	**1.714.399.495**	**(136.592.482)**	**(7,38)**	**144.632.517**	**106.884.778**	**251.517.295**	**144.949.086**	**91.661.318**	**236.610.404**	**(14.906.891)**	**(5,93)**
4.01	Administrasi Pemerintahan	0	0	-	-	121.318.270	83.043.606	204.361.876	121.572.881	78.937.849	200.510.730	(3.851.146)	(1,88)
4.02	Pengawasan	0	0	-	-	5.217.437	3.530.500	8.747.937	5.155.776	2.386.096	7.541.872	(1.206.065)	(13,79)
4.03	Perencanaan	0	0	-	-	3.336.902	4.479.944	7.816.846	3.287.767	2.977.417	6.265.184	(1.551.662)	(19,85)
4.04	Keuangan	1.850.991.977	1.714.399.495	(136.592.482)	(7,38)	10.570.033	6.883.415	17.453.448	10.700.656	5.079.670	15.780.326	(1.673.122)	(9,59)
4.05	Kepegawaian	0	0	-	-	4.189.875	8.548.313	12.738.188	4.232.006	2.122.180	6.354.186	(6.384.002)	(50,12)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0	0	-	-	0	399.000	399.000	0	158.106	158.106	(240.894)	(60,37)
	JUMLAH	**2.042.708.319**	**1.889.271.367**	**(153.436.952)**	**(7,51)**	**1.281.187.859**	**814.625.460**	**2.095.813.319**	**1.271.877.873**	**739.087.255**	**2.010.965.128**	**(84.848.191)**	**(4,05)**

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	567.164.917.000,00	556.203.136.000,00	(10.961.781.000,00)	(1,93)	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	435.453.649.000,00	420.369.760.000,00	(15.083.889.000,00)	(3,46)	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	435.453.649.000,00	420.369.760.000,00	(15.083.889.000,00)	(3,46)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	131.711.268.000,00	135.833.376.000,00	4.122.108.000,00	3,13	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah**	2.939.889.000,00	1.935.536.000,00	(1.004.353.000,00)	(34,16)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	*Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran*	1.147.905.000,00	916.810.000,00	(231.095.000,00)	(20,13)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	678.800.000,00	523.463.000,00	(155.337.000,00)	(22,88)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	469.105.000,00	393.347.000,00	(75.758.000,00)	(16,15)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	*Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi*	160.000.000,00	38.458.000,00	(121.542.000,00)	(75,96)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	38.458.000,00	(121.542.000,00)	(75,96)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor*	297.358.000,00	154.195.000,00	(143.163.000,00)	(48,14)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.358.000,00	154.195.000,00	(143.163.000,00)	(48,14)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor*	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai*	27.700.000,00	2.000.000,00	(25.700.000,00)	(92,78)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	2.000.000,00	(25.700.000,00)	(92,78)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.040.000,00	749.000,00	(47.291.000,00)	(98,44)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16	*Penyusunan Buku Profil PNS*	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	0,00	(14.550.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 17	*Fasilitasi Pengurusan Administrasi Mutasi PNS*	30.000.000,00	13.171.000,00	(16.829.000,00)	(56,10)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.220.000,00	(930.000,00)	(29,52)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	10.951.000,00	(15.899.000,00)	(59,21)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 18	*Penataan File Kepegawaian*	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19	*Fasilitasi Masalah Kepegawaian dan Pemantauan Disiplin PNS*	100.000.000,00	18.533.000,00	(81.467.000,00)	(81,47)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.110.000,00	14.400.000,00	(17.710.000,00)	(55,15)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.890.000,00	4.133.000,00	(63.757.000,00)	(93,91)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20	*Pengelolaan Administrasi PTT*	7.293.000,00	3.837.000,00	(3.456.000,00)	(47,39)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	1.840.000,00	(460.000,00)	(20,00)	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.993.000,00	1.997.000,00	(2.996.000,00)	(60,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.738.188.000,00)	(6.354.186.000,00)	6.384.002.000,00	(50,12)	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LEMBARAN DAERAH ABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

Printed By SimDa

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	22.172.752.000	66.830.434.000	37.336.963.000	126.340.149.000	20.493.001.000	69.926.755.000	42.343.349.000	132.763.105.000	6.422.956.000	5
1.01	**Pendidikan**	22.172.752.000	66.830.434.000	37.336.963.000	126.340.149.000	20.493.001.000	69.926.755.000	42.343.349.000	132.763.105.000	6.422.956.000	5
1.01 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	22.172.752.000	66.830.434.000	37.336.963.000	126.340.149.000	20.493.001.000	69.926.755.000	42.343.349.000	132.763.105.000	6.422.956.000	5
1.01 . 1.01.01 . 01	***Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah***	*784.750.000*	*2.017.006.000*	*138.133.000*	*2.939.889.000*	*533.863.000*	*1.311.211.000*	*90.462.000*	*1.935.536.000*	*(1.004.353.000)*	(34)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	678.800.000	469.105.000	0	1.147.905.000	523.463.000	393.347.000	0	916.810.000	(231.095.000)	(20)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	0	160.000.000	0	160.000.000	0	38.458.000	0	38.458.000	(121.542.000)	(76)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0	297.358.000	0	297.358.000	0	154.195.000	0	154.195.000	(143.163.000)	(48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	0	27.700.000	0	27.700.000	0	2.000.000	0	2.000.000	(25.700.000)	(93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	8.000.000	4.156.000	0	12.156.000	6.000.000	1.714.000	0	7.714.000	(4.442.000)	(37)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Pendataan Pendidikan	97.950.000	59.220.000	0	157.170.000	4.400.000	92.697.000	0	97.097.000	(60.073.000)	(38)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Operasional Korwilcam	0	999.467.000	138.133.000	1.137.600.000	0	628.800.000	60.462.000	689.262.000	(448.338.000)	(39)
1.01 . 1.01.01 . 15	***Program Pendidikan Anak Usia Dini***	*35.640.000*	*463.932.000*	*183.256.000*	*682.828.000*	*1.770.000*	*246.812.000*	*177.756.000*	*426.338.000*	*(256.490.000)*	(38)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Bantuan Operasional PAUD	0	13.200.000	46.800.000	60.000.000	0	11.962.000	41.300.000	53.262.000	(6.738.000)	(11)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik)	0	27.000.000	0	27.000.000	0	28.200.000	0	28.200.000	1.200.000	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	35.640.000	347.732.000	0	383.372.000	1.770.000	130.650.000	0	132.420.000	(250.952.000)	(65)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 04	Pengembangan Prasarana dan Sarana PAUD (DAK)	0	76.000.000	136.456.000	212.456.000	0	76.000.000	136.456.000	212.456.000	0	0
1.01 . 1.01.01 . 16	***Program Wajar Dikdas 9 Tahun***	*7.404.112.000*	*45.309.735.000*	*37.015.574.000*	*89.729.421.000*	*5.779.770.000*	*51.029.239.000*	*41.875.131.000*	*98.684.140.000*	*8.954.719.000*	10
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	Bantuan Operasional Sekolah	6.587.187.000	42.402.737.000	6.405.476.000	55.395.400.000	5.541.140.000	47.141.203.000	10.020.910.000	62.703.253.000	7.307.853.000	13
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SD	125.990.000	1.043.880.000	0	1.169.870.000	94.493.000	934.642.000	0	1.029.135.000	(140.735.000)	(12)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SMP	68.355.000	301.645.000	0	370.000.000	49.917.000	221.363.000	0	271.280.000	(98.720.000)	(27)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06	Pemenuhan Sarana – Prasarana SD (DAK)	0	0	18.860.900.000	18.860.900.000	0	511.075.000	18.328.675.000	18.839.750.000	(21.150.000)	0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07	Pemenuhan Sarana – Prasarana SMP (DAK)	0	0	6.987.848.000	6.987.848.000	0	1.289.340.000	5.688.008.000	6.977.348.000	(10.500.000)	0
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08	Penanganan dan Evaluasi AUS - TS	56.520.000	125.085.000	0	181.605.000	42.390.000	53.742.000	0	96.132.000	(85.473.000)	(47)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10	Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SD	2.320.000	59.891.000	0	62.211.000	1.740.000	23.783.000	0	25.523.000	(36.688.000)	(59)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
	JUMLAH	465.123.000	8.083.190.000	0	8.548.313.000	230.928.000	1.887.952.000	3.300.000	2.122.180.000	(6.426.133.000)	(75)

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH ABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

Printed By SimDa

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
				RP.	%
1	2	3	4	5	6
01	**PELAYANAN UMUM**	**261.415.849**	**246.031.006**	**(15.384.843)**	**(5,89)**
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	6.148.472	6.157.371	8.899	0,14
01 2 14	Statistik	217.460	141.877	(75.583)	(34,76)
01 2 15	Persandian	233.000	147.712	(85.288)	(36,60)
01 2 18	Kearsipan	3.299.622	2.973.642	(325.980)	(9,88)
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	204.361.876	200.510.730	(3.851.146)	(1,88)
01 4 02	Pengawasan	8.747.937	7.541.872	(1.206.065)	(13,79)
01 4 03	Perencanaan	7.816.846	6.265.184	(1.551.662)	(19,85)
01 4 04	Keuangan	17.453.448	15.780.326	(1.673.122)	(9,59)
01 4 05	Kepegawaian	12.738.188	6.354.186	(6.384.002)	(50,12)
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	399.000	158.106	(240.894)	(60,37)
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**16.421.656**	**14.215.811**	**(2.205.845)**	**(13,43)**
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.421.656	14.215.811	(2.205.845)	(13,43)
04	**EKONOMI**	**494.714.501**	**514.396.233**	**19.681.732**	**3,98**
04 2 01	Tenaga Kerja	5.336.886	5.573.461	236.575	4,43
04 2 03	Pangan	12.296.284	12.779.021	482.737	3,93
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	393.160.920	403.502.033	10.341.113	2,63
04 2 09	Perhubungan	16.322.910	15.157.572	(1.165.338)	(7,14)
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.081.892	5.052.302	(1.029.590)	(16,93)
04 2 12	Penanaman Modal	3.947.853	3.276.351	(671.502)	(17,01)
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	1.898.444	1.525.939	(372.505)	(19,62)
04 3 03	Pertanian	31.103.184	22.213.256	(8.889.928)	(28,58)
04 3 06	Perdagangan	19.881.192	41.655.792	21.774.600	109,52
04 3 07	Perindustrian	4.484.936	3.654.629	(830.307)	(18,51)

1		2	3	4	5	6
04	3 08	Transmigrasi	200.000	5.877	(194.123)	(97,06)
05		**LINGKUNGAN HIDUP**	**21.882.630**	**22.282.846**	**400.216**	**1,83**
05	2 04	Pertanahan	1.280.500	2.424.648	1.144.148	89,35
05	2 05	Lingkungan Hidup	20.602.130	19.858.198	(743.932)	(3,61)
06		**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**168.333.958**	**94.691.296**	**(73.642.662)**	**(43,75)**
06	1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.219.225	72.297.584	(58.921.641)	(44,90)
06	1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37.114.733	22.393.712	(14.721.021)	(39,66)
07		**KESEHATAN**	**358.461.734**	**356.957.440**	**(1.504.294)**	**(0,42)**
07	1 02	Kesehatan	351.021.451	350.001.983	(1.019.468)	(0,29)
07	2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.440.283	6.955.457	(484.825)	(6,52)
08		**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**10.416.676**	**5.183.748**	**(5.232.928)**	**(50,24)**
08	2 16	Kebudayaan	5.495.619	3.214.771	(2.280.848)	(41,50)
08	3 02	Pariwisata	4.921.057	1.968.977	(2.952.080)	(59,99)
10		**PENDIDIKAN**	**732.699.306**	**714.227.198**	**(18.472.108)**	**(2,52)**
10	1 01	Pendidikan	711.354.851	706.296.845	(5.058.005)	(0,71)
10	2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	20.087.945	7.451.429	(12.636.516)	(62,91)
10	2 17	Perpustakaan	1.256.510	478.924	(777.585)	(61,88)
11		**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**31.467.009**	**42.979.550**	**11.512.541**	**36,59**
11	1 06	Sosial	22.898.971	35.167.321	12.268.350	53,58
11	2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	614.719	421.417	(193.302)	(31,45)
11	2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.953.319	7.390.812	(562.507)	(7,07)
		JUMLAH	**2.095.813.319**	**2.010.965.128**	**(84.848.191)**	**(4,05)**

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	2	-	2
GOLONGAN IV/d	-	1	1	-	-	3	1	6
GOLONGAN IV/c	-	26	2	-	-	6	-	34
GOLONGAN IV/b	-	3	41	2	-	84	-	130
GOLONGAN IV/a	-	-	65	43	-	1.652	6	1.766
JUMLAH GOLONGAN IV	**-**	**30**	**109**	**45**	**-**	**1.747**	**7**	**1.938**
GOLONGAN III/d	-	-	24	269	-	612	61	966
GOLONGAN III/c	-	-	2	120	-	654	117	893
GOLONGAN III/b	-	-	-	42	-	836	275	1.153
GOLONGAN III/a	-	-	-	12	-	456	546	1.014
JUMLAH GOLONGAN III	**-**	**-**	**26**	**443**	**-**	**2.558**	**999**	**4.026**
GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	199	226	425
GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	51	309	360
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	-	180	180
GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	9	59	68
JUMLAH GOLONGAN II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259**	**774**	**1.033**
GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	70	70
GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	23	23
GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	7	7
GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**
TOTAL	**-**	**30**	**135**	**488**	**-**	**4.564**	**1.880**	**7.097**

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AKHIR TAHUN 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	**PIUTANG PAJAK**		**273.782.130**	**0**	**273.782.130**	**-**
1	Piutang Pajak Reklame		95.661.203	0	95.661.203	-
2	Piutang Pajak Air Tanah		58.653.675	0	58.653.675	-
3	Piutang PBB-P2		119.467.252	0	119.467.252	-
II	**PIUTANG RETRIBUSI**		**231.607.440**	**0**	**231.607.440**	**-**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		0	0	0	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		0	0	0	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		114.196.000	0	114.196.000	-
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		0	0	0	-
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		17.275.840		17.275.840	
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		95.185.600		95.185.600	
7	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		4.950.000	0	4.950.000	-
III	**PIUTANG LAIN-LAIN**		**35.557.686.982**	**0**	**35.557.686.982**	**-**
1	Piutang Pasien		1.388.004.064	0	1.388.004.064	-
2	Piutang Klaim Asuransi		0	0	0	-
3	Piutang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		0		0	-
4	Piutang Tambahan Penghasilan Pegawai		0		0	-
5	Piutang Pembuangan Limbah		0	0	0	-
6	Piutang Jasa Pelayanan		33.576.083.408		33.576.083.408	-

1	2	3	4	5	6	7
7	Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama		63.248.000		63.248.000	-
8	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan		530.351.510		530.351.510	-
IV	**PIUTANG BAGI HASIL PAJAK**		**7.426.825.925**		**7.426.825.925**	-
V	**PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM**		**283.402.179**		**283.402.179**	-
VI	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**		**2.678.832.318**		**2.678.832.318**	-
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.678.832.318		2.678.832.318	-
	Jumlah		**46.452.136.974**	**0**	**46.452.136.974**	-

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2019	PENYERTAAN MODAL TAHUN 2020	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2020	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN 2019	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN 2020	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN S.D. TAHUN 2019
1	2	3	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	1985	PD. BPR-BKK Purbalingga	12.632.000.000	500.000.000	13.132.000.000	-	2.840.872.000	-	13.132.000.000
2	1985	PD. BKK-Karangmoncol	2.534.000.000	-	2.534.000.000	-	-	-	2.534.000.000
3	1968	PDAM	72.212.050.151	3.300.000.000	75.512.050.151	-	3.579.085.000	-	75.512.050.151
4	1999	PT. Bank BPD Jateng	33.605.000.000	1.000.000.000	34.605.000.000	-	6.899.456.000	-	34.605.000.000
5	1991	PD. BPR Artha Perwira	8.900.000.000	1.000.000.000	9.900.000.000	-	2.825.115.000	-	9.900.000.000
6	2003	PT.BPRS Buana Mitra Perwira	4.770.000.000	500.000.000	5.270.000.000	-	991.039.000	-	5.270.000.000
7	2004	PD. Purbalingga Ventura	1.131.302.934	-	1.131.302.934	-	-	-	1.131.302.934
8	2004	PD. Puspahastama	4.080.000.000	-	4.080.000.000	-	-	-	4.080.000.000
9	2005	PD. Owabong	33.595.671.632	2.000.000.000	35.595.671.632	-	4.545.876.000	-	35.595.671.632
10	1995	PT PRPP	128.000.000	-	128.000.000	-	-	-	128.000.000
JUMLAH			**173.588.024.717**	**8.300.000.000**	**181.888.024.717**	**-**	**21.681.443.000**	**-**	**181.888.024.717**

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
1	Tanah	599.230.112.724	4.699.950.000		603.930.062.724
2	Jalan dan Jembatan	1.090.671.040.104	26.202.190.000		1.116.873.230.104
3	Bangunan Air (irigasi)	107.288.481.520	8.278.943.000		115.567.424.520
4	Instalasi	15.673.872.115	335.106.000		16.008.978.115
5	Jaringan	57.471.069.680	7.347.946.000		64.819.015.680
6	Gedung	848.702.482.261	37.934.076.000		886.636.558.261
7	Monumen	7.572.393.124	-		7.572.393.124
8	Alat-alat Berat / Besar	15.546.683.801	-		15.546.683.801
9	Alat-alat Angkut	88.511.775.286	2.224.328.000		90.736.103.286
10	Alat-alat Bengkel dan Ukur	4.637.227.817	32.030.000		4.669.257.817
11	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.452.167.711	73.309.000		1.525.476.711
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	153.676.268.869	28.440.049.000		182.116.317.869
13	Alat-alat Studio & Komunikasi	11.610.439.116	348.025.000		11.958.464.116
14	Alat Kedokteran	73.352.503.521	26.164.115.000		99.516.618.521
15	Alat Laboratorium	39.816.328.886	4.485.838.000		44.302.166.886
16	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	479.522.750	77.900.000		557.422.750
17	Buku Perpustakaan	61.716.225.669	9.286.082.000		71.002.307.669
18	Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	9.690.520.090	2.043.850.000		11.734.370.090
19	Hewan, Ternak dan Tanaman	575.640.141	-		575.640.141

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
20	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-		-
	JUMLAH	**3.187.674.755.185**	**157.973.737.000**	-	**3.345.648.492.185**

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Aset Lain-lain	Saldo pada Akhir Tahun 2019	Perkiraan Penambahan Tahun 2020	Perkiraan Pengurangan Tahun 2020	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2020
1	Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189,00			25.638.189,00
2	Barang Tidak Berwujud	325.893.250,00			325.893.250,00
3	Aset Lain-lain	36.930.508.877,76			36.930.508.877,76
					-
		-			-
	JUMLAH	**37.282.040.316,76**	-	-	**37.282.040.316,76**

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019		JUMLAH REALISASI S.D T.A 2019	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DLM TA 2020	
		APBD TA 2019	PERUBAHAN APBD TA 2019		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL (Rp.)	TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH (Rp.)	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH (Rp.)	SALDO AKHIR (Rp.)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH			-	-	-	-	-	-

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI	TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH SISA PEMBAYARAN		JUMLAH PEMBAYARAN TH 2018	
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA (Rp.)	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH									-	-	-

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-208/2020)